



Relasi Kekuasaan Politik dan Fragmentasi Kepentingan dalam Jaringan Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Agam

Edo Syahputra Jamal¹, Asrinaldi², Roni Ekha Putera³

¹Universitas Andalas, Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Padang, Indonesia, edosjamal@gmail.com

²Universitas Andalas, Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Padang, Indonesia, asrinaldi@soc.unand.ac.id

³Universitas Andalas, Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Padang, Indonesia, roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Corresponding Author: edosjamal@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze how political power relations and interest fragmentation affect the dynamics of the stunting reduction policy network in Agam Regency. Using a qualitative approach and case study design, the research examines the interaction among formal and informal actors in implementing the policy, based on Frans van Waarden's (1992) seven policy network dimensions, with a focus on power relations and interest fragmentation. The findings reveal that the centralized power structure and dominance of structural actors, such as the Regional Secretary, hinder horizontal collaboration and local actors' initiative. Furthermore, fragmented interests among agencies and weak inter-sectoral coordination have resulted in a sectoral and unintegrated implementation of stunting reduction programs. Unequal access to information, central dominance in decision-making, and lack of collective accountability have further weakened policy effectiveness. This study contributes to expanding the application of policy network theory in public health governance and emphasizes the importance of reforming coordination structures, empowering local actors, and adopting a multilevel governance approach to manage complex health issues like stunting.*

Keywords: *policy network, stunting, political power, interest fragmentation, cross-sector collaboration*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kekuasaan politik dan fragmentasi kepentingan memengaruhi dinamika jaringan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Agam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji interaksi antar aktor formal dan nonformal dalam implementasi kebijakan berdasarkan tujuh dimensi jaringan kebijakan dari Frans van Waarden (1992), dengan fokus pada dimensi hubungan kekuasaan dan kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan yang bersifat sentralistik dan dominasi aktor struktural, seperti Sekretaris Daerah, telah menghambat kolaborasi horizontal dan inisiatif aktor lokal. Selain itu, fragmentasi kepentingan antar OPD serta lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan kebijakan berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi. Ketimpangan akses informasi, dominasi keputusan dari pusat jaringan, serta minimnya akuntabilitas kolektif memperlemah

efektivitas kebijakan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang teori jaringan kebijakan dalam konteks isu kesehatan publik, sekaligus menyarankan pentingnya reformulasi struktur koordinasi, penguatan peran aktor lokal, dan penerapan pendekatan *multilevel governance* dalam menghadapi isu kompleks seperti stunting.

Kata kunci: jaringan kebijakan, stunting, kekuasaan politik, fragmentasi kepentingan, kolaborasi lintas sektor

PENDAHULUAN

Masalah stunting telah menjadi isu strategis nasional karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, prestasi belajar yang lebih rendah, hingga produktivitas ekonomi yang berkurang ketika dewasa. Oleh karena itu, pemerintah pusat menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional, yang secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dalam kebijakan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, yang diharapkan mampu mengonsolidasikan program lintas sektor secara konvergen dan terkoordinasi hingga ke level desa dan keluarga.

Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Agam, kebijakan ini diterjemahkan ke dalam berbagai program daerah seperti *Bapak Asuh Anak Stunting*, *Sistem Informasi Konseling dan Cegah Stunting (Sikocit)*, serta penguatan intervensi berbasis nagari melalui struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua level pemerintahan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen lokal dalam mendukung kebijakan nasional. Namun demikian, capaian empiris belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Agam masih berada pada angka 24,6%, jauh di atas target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 (Kemenko PMK, 2024). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas fakta bahwa, di balik kerangka kebijakan yang tampak progresif dan kolaboratif, masih terdapat fragmentasi kepentingan dan ketimpangan relasi kekuasaan yang menghambat efektivitas jaringan kebijakan di daerah. Aktor-aktor dalam jaringan kebijakan, baik yang bersifat struktural seperti OPD maupun nonstruktural seperti lembaga sosial, masih cenderung bekerja dalam batas sektoral masing-masing tanpa keterhubungan substantif. Koordinasi lintas sektor kerap bersifat prosedural, bukan fungsional. Terdapat pula tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya akuntabilitas bersama, serta dinamika politik lokal yang memperkeruh proses koordinasi, terutama pada masa transisi kepemimpinan daerah.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *policy network* menjadi penting digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana interaksi antaraktor membentuk, memengaruhi, dan membatasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Dengan merujuk pada kerangka teori jaringan kebijakan Frans van Waarden (1992), penelitian ini memetakan dinamika kebijakan melalui tujuh dimensi penting: aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan perilaku, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi aktor dan posisinya dalam jaringan, tetapi juga untuk mengungkap pola kekuasaan, hambatan komunikasi, serta strategi adaptasi yang berkembang dalam proses kebijakan.

Fokus utama penelitian diarahkan pada dimensi *power relations* dan fragmentasi kepentingan, karena keduanya dianggap sebagai variabel kunci dalam menjelaskan mengapa jaringan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Agam belum berjalan secara optimal.

Dinamika relasi kekuasaan yang mengemuka memperlihatkan dominasi aktor tertentu dalam menentukan arah kebijakan, sementara aktor lain mengalami eksklusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini konsisten dengan temuan Klijn (1996), bahwa dalam konteks kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor, ketimpangan pengaruh dan akses terhadap sumber daya dapat menimbulkan disfungsi jaringan dan melemahkan efektivitas kolaborasi.

Berdasarkan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *Bagaimana relasi kekuasaan politik dan fragmentasi kepentingan memengaruhi dinamika jaringan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Agam?* Pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori kebijakan, khususnya pada pendekatan *collaborative governance* dan *multilevel policy network* dalam penanganan isu kesehatan publik yang kompleks. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif, integratif, dan kontekstual bagi pelaku kebijakan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap makna, relasi kekuasaan, dan dinamika sosial-politik antar aktor yang terlibat dalam kebijakan publik secara mendalam (Creswell, 2013). Studi kasus sangat relevan untuk menelusuri peristiwa dan konteks kebijakan tertentu secara menyeluruh, khususnya dalam melihat bagaimana fragmentasi kepentingan dan distribusi kekuasaan memengaruhi efektivitas kebijakan (Yin, 2014). Subjek penelitian terdiri dari aktor-aktor kunci dalam jaringan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Agam, baik formal maupun nonformal. Aktor formal meliputi Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, DPMN, camat, wali nagari, kepala puskesmas, dan bidan desa. Sementara aktor nonformal mencakup RSIA Rizki Bunda, Baznas, akademisi, serta masyarakat penerima manfaat stunting. Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive, yakni dengan memilih individu yang dianggap paling memahami dan memiliki peran strategis dalam kebijakan tersebut (Miles dan Huberman, 1994).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan fokus lokasi di Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Ampek Nagari. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan representasi tingkat stunting yang tinggi dan keberagaman struktur pemerintahan nagari. Penelitian dilakukan selama Januari hingga Mei 2025. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam yang disusun berdasarkan tujuh dimensi jaringan kebijakan Frans van Waarden (1992), dengan fokus pada dimensi hubungan kekuasaan (*power relations*) dan fragmentasi kepentingan. Pertanyaan wawancara diarahkan untuk menggali peran, pengaruh, strategi, dan relasi antar aktor dalam kebijakan stunting. Selain itu, digunakan pula studi dokumentasi terhadap SK TPPS, RPJMD, dan regulasi daerah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap kegiatan rapat koordinasi lintas sektor, dan telaah dokumen kebijakan. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), dengan tahapan koding data, kategorisasi tema, dan interpretasi berdasarkan dimensi jaringan dan kekuasaan.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang bertujuan membandingkan data antar informan dan antar metode (Patton, 1990). Penelitian juga menjunjung tinggi prinsip etika, seperti meminta persetujuan narasumber, menjaga kerahasiaan identitas, serta melakukan klarifikasi terhadap kutipan langsung sebelum publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan temuan-temuan lapangan secara kritis dalam kerangka teori jaringan

kebijakan Frans van Waarden (1992). Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Agam tidak dapat dipahami hanya dari sisi kelembagaan formal, melainkan harus dilihat melalui dinamika relasi sosial, politik, dan institusional yang melibatkan berbagai aktor. Pembahasan difokuskan pada dua dimensi utama dalam jaringan kebijakan, yakni relasi kekuasaan (*power relations*) dan fragmentasi kepentingan antar aktor, yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kolaborasi lintas sektor. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan empiris dengan ekspektasi normatif dari kebijakan nasional serta prinsip-prinsip koordinasi dalam jaringan kebijakan yang ideal. Dalam kerangka ini, masing-masing temuan diinterpretasikan sebagai cerminan dari ketimpangan peran, lemahnya struktur kolaborasi, serta kurangnya pelembagaan yang kokoh antar sektor.

Pembahasan juga diarahkan untuk melihat bagaimana aktor-aktor kunci seperti Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun pihak non-pemerintah seperti Baznas dan RSIA Rizki Bunda membentuk pola relasi yang mencerminkan distribusi kekuasaan dan diferensiasi kepentingan. Pola-pola ini kemudian ditelaah dari sisi dampaknya terhadap koordinasi, efektivitas program, dan keberlanjutan kebijakan. Dengan pendekatan ini, pembahasan tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap model tata kelola kebijakan penurunan stunting yang lebih adaptif, kolaboratif, dan kontekstual.

Relasi Kekuasaan (*Power Relations*)

Relasi kekuasaan dalam jaringan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Agam menunjukkan pola yang cenderung sentralistik dan hierarkis. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa posisi Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memiliki otoritas dominan dalam menentukan arah kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program. Kewenangan yang terpusat ini mengakibatkan aktor-aktor teknis seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, dan OPD lainnya beroperasi dalam posisi yang menunggu arahan, bukan sebagai inisiator atau mitra setara dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan semangat konvergensi stunting yang mengedepankan prinsip koordinatif dan kolaboratif lintas sektor.

Kecenderungan kekuasaan yang vertikal ini menimbulkan hambatan dalam pencapaian kolaborasi horizontal yang efektif, sebagaimana diharapkan dalam kerangka *policy network* menurut Van Waarden (1992). Dalam teori ini, distribusi kekuasaan seharusnya dibagi secara lebih merata agar seluruh aktor dalam jaringan dapat berinteraksi secara timbal balik dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik di Kabupaten Agam, keputusan penting masih didominasi oleh pejabat struktural di tingkat kabupaten, sehingga ruang diskusi dan inisiatif dari aktor di tingkat kecamatan atau nagari menjadi terbatas. Wali nagari, bidan desa, dan kader kesehatan umumnya hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai pembentuk strategi atau penentu prioritas intervensi.

Selain itu, terdapat ketimpangan akses informasi dan kontrol narasi dalam jaringan kebijakan ini. Beberapa OPD atau lembaga mitra tidak memiliki akses yang setara terhadap data stunting dan perkembangan kebijakan, karena sentralisasi pelaporan hanya berhenti di level TPPS kabupaten. Dalam beberapa kasus, misalnya, kader gizi atau kepala puskesmas tidak sepenuhnya dilibatkan dalam penentuan lokus intervensi, meskipun mereka memiliki basis data dan pemahaman konteks lapangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi dan menghambat koordinasi berbasis kebutuhan lokal.

Dinamika kekuasaan ini juga terlihat dalam konteks program-program inovatif daerah, seperti *Sikocit* dan *Bapak Asuh Anak Stunting*, di mana pelibatan aktor nonpemerintah seperti Baznas dan RSIA Rizki Bunda cenderung difasilitasi oleh keputusan top-down, tanpa keterlibatan penuh dari masyarakat penerima manfaat atau struktur nagari. Ketimpangan relasi

seperti ini menyulitkan terwujudnya ownership kebijakan di tingkat akar rumput, yang padahal sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program stunting.

Selanjutnya persoalan mendasar dalam dimensi hubungan kekuasaan pada jaringan kebijakan penanganan stunting, di mana distribusi otoritas dan kewenangan antar aktor tidak berjalan secara proporsional dan efektif. Dalam teori jaringan kebijakan, kekuasaan tidak hanya diukur dari posisi formal dalam struktur, tetapi juga dari kemampuan aktor untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya. Ketimpangan relasi kekuasaan ini tampak jelas ketika kepala daerah tidak hadir secara aktif dalam forum strategis, serta ketika OPD yang hadir dalam rapat koordinasi tidak memiliki kapasitas substansi maupun otoritas untuk mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan lemahnya figur sentral (*central node*) dalam jaringan yang seharusnya mampu mengarahkan jalannya kolaborasi lintas sektor. Ketidakhadiran komando politik yang kuat menyebabkan upaya konvergensi antar sektor hanya berlangsung secara prosedural, bukan substantif. Akibatnya, program penurunan stunting yang seharusnya bersifat lintas sektor dan kolaboratif, justru terfragmentasi, berjalan normatif, dan tidak berdampak signifikan di tingkat implementasi. Ini sejalan dengan kritik dalam literatur jaringan kebijakan bahwa tanpa penguatan peran aktor dominan yang memiliki legitimasi dan sumber daya, jaringan kebijakan akan gagal dalam mencapai tujuannya secara efektif.

Dengan demikian, relasi kekuasaan yang timpang dan bersifat top-down menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan efektivitas jaringan kebijakan stunting di Kabupaten Agam. Meskipun secara struktural TPPS sudah dibentuk sesuai dengan ketentuan nasional, praktik kekuasaan yang terpusat tanpa mekanisme checks and balances menyulitkan kolaborasi sejati antar aktor. Diperlukan reformulasi struktur koordinasi dan redistribusi kewenangan agar kolaborasi dalam jaringan kebijakan benar-benar mencerminkan keterlibatan multisektor yang setara dan dinamis.

Fragmentasi Kepentingan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya fragmentasi kepentingan antar aktor dalam jaringan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Agam. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maupun lembaga terkait menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, namun dengan koordinasi yang lemah. Hal ini menyebabkan kebijakan stunting berjalan dalam lorong-lorong sektoral, tanpa integrasi substansial lintas program dan lembaga. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan lebih menekankan aspek intervensi spesifik seperti pendataan EPPGBM dan pelayanan gizi, sementara Dinas Sosial bergerak dengan program bantuan sosial tanpa merujuk pada data hasil surveilans gizi anak yang seharusnya dijadikan dasar intervensi. Fenomena ini menunjukkan kegagalan dalam *policy convergence*, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam penurunan stunting berbasis multisektor (Van Waarden, 1992).

Fragmentasi ini juga muncul pada aspek perencanaan dan alokasi sumber daya. Beberapa OPD mengajukan program penanganan stunting secara sendiri-sendiri dalam Musrenbang atau RKPD, tanpa mekanisme konsolidasi anggaran berbasis lokus prioritas. Hal ini berujung pada duplikasi kegiatan, pemborosan anggaran, dan lemahnya fokus program pada kelompok sasaran utama. Dalam wawancara dengan informan Bappeda dan DPPKB, terungkap bahwa walaupun sudah ada forum koordinasi TPPS, namun belum menjadi medium strategis untuk menyatukan desain kebijakan secara menyeluruh. Koordinasi yang bersifat prosedural tidak mampu menjawab kebutuhan akan integrasi substantif berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.

Lebih jauh, faktor politik lokal turut memperparah fragmentasi kepentingan dalam jaringan kebijakan ini. Dalam penetapan lokus stunting, terdapat indikasi bahwa kedekatan politis antara kepala daerah dan pimpinan nagari mempengaruhi pemilihan wilayah sasaran. Ini menimbulkan persepsi tidak adil di kalangan stakeholder teknis, karena beberapa nagari dengan beban stunting tinggi justru tidak masuk dalam prioritas intervensi. Dominasi pertimbangan politik ini menyebabkan kebijakan kehilangan objektivitas teknokratis dan menjauh dari prinsip

keadilan sosial. Padahal, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 72 Tahun 2021, penentuan lokus seharusnya didasarkan pada prevalensi dan kerentanan gizi masyarakat.

Akibat fragmentasi ini, struktur kolaborasi dalam jaringan kebijakan menjadi rapuh. Alih-alih bekerja dalam satu kerangka terpadu, para aktor lebih fokus pada keberhasilan sektoral masing-masing. Tidak adanya *mechanism of mutual accountability* dan lemahnya sistem pelaporan bersama menyebabkan kegiatan lintas sektor berjalan paralel, bukan terintegrasi. Bahkan program inovatif seperti *Bapak Asuh Anak Stunting* dan *Sikocit*, meskipun progresif dari sisi inisiatif lokal, masih menghadapi kendala dalam sinkronisasi antar pelaksana di lapangan.

Aktor dalam jaringan kebijakan pada dasarnya merupakan salah satu elemen penting dalam memahami dinamika implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Agam. Berdasarkan teori jaringan kebijakan dari Frans van Waarden, aktor tidak hanya dipahami sebagai individu, melainkan mencakup institusi dan organisasi yang memiliki mandat, sumber daya, dan kepentingan tertentu yang saling berinteraksi dalam sebuah sistem kebijakan. Penanganan stunting di Kabupaten Agam memperlihatkan pola kerja multisektor dan multipihak, di mana aktor utama seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berperan sebagai sekretariat TPPS sekaligus koordinator kebijakan. Sementara itu, aktor pendukung seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, dan OPD lainnya menjalankan peran-peran sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kehadiran aktor teknis di lapangan, seperti Puskesmas, Posyandu, dan pendamping PKH, menjadi ujung tombak dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam praktiknya, peran mereka sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, ketidaksinkronan data, hingga kurangnya dukungan dari aktor lain dalam jaringan. Di sisi lain, aktor non-formal seperti Baznas dan sektor swasta juga memainkan peran pelengkap yang strategis melalui pemberian bantuan dan dukungan sosial. Walau tidak terlembaga secara formal, kontribusi mereka membantu menutup celah yang tidak dapat dijangkau oleh jalur birokrasi formal. Walaupun pemanfaatan aktor swasta belum begitu maksimal.

Wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting sangat bergantung pada efektivitas interaksi dan kolaborasi antar-aktor, baik yang memiliki wewenang struktural maupun yang bekerja di tingkat akar rumput. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi masih berkisar pada lemahnya koordinasi lintas sektor, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya pemahaman substansial dari sebagian aktor terhadap isu stunting secara komprehensif. Hal ini mempertegas bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa hanya bertumpu pada kerja sektoral, tetapi memerlukan integrasi peran aktor yang selaras dalam jaringan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, fragmentasi kepentingan antar aktor merupakan hambatan sistemik dalam membangun jaringan kebijakan stunting yang efektif di Kabupaten Agam. Ketidakterhubungan antar kebijakan, minimnya transparansi data, dan lemahnya kepemimpinan kolaboratif memperkuat kesimpulan bahwa secara struktural kebijakan terlihat kolaboratif, tetapi secara substantif belum mencerminkan kerja sama lintas sektor yang sejati. Untuk itu, perlu perombakan cara pandang dalam membangun jaringan kebijakan, dari yang bersifat administratif prosedural menjadi model kolaboratif substantif berbasis kepercayaan, kesetaraan, dan tujuan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan politik dan fragmentasi kepentingan antar aktor memengaruhi dinamika jaringan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa struktur jaringan kebijakan stunting di daerah ini masih menunjukkan kecenderungan sentralistik dan top-down, di mana posisi strategis seperti Sekretaris Daerah sebagai Ketua

TPPS menjadi pusat pengambilan keputusan tanpa distribusi otoritas yang memadai kepada OPD teknis atau aktor di tingkat nagari. Hal ini menyebabkan aktor pelaksana di lapangan lebih berfungsi sebagai operator kebijakan ketimbang sebagai pengambil keputusan atau inovator solusi. Sentralisasi kekuasaan ini juga berdampak pada terbatasnya ruang inisiatif lokal dan lemahnya koordinasi horizontal antar lembaga.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa fragmentasi kepentingan antar aktor menjadi kendala sistemik dalam membangun jaringan kebijakan yang utuh. Masing-masing lembaga menjalankan program sektoral tanpa integrasi atau rujukan bersama terhadap data dan indikator teknis yang disepakati. Akibatnya, terjadi tumpang tindih peran, redundansi program, serta kurangnya efisiensi dalam alokasi anggaran. Dominasi kepentingan politik dalam penentuan prioritas wilayah intervensi juga memperburuk objektivitas teknokratis kebijakan. Ini memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan dan kepentingan politik lokal secara nyata membentuk arah kebijakan dan praktik birokrasi, sehingga berdampak pada efektivitas program penurunan stunting.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas aplikasi teori jaringan kebijakan (*policy network theory*) pada konteks isu kesehatan publik, khususnya dalam aspek distribusi kekuasaan, strategi aktor, dan pelembagaan interaksi lintas sektor. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya membentuk struktur koordinasi atau menetapkan regulasi, namun perlu ada redistribusi peran dan penguatan kapasitas aktor dalam jaringan agar prinsip kolaboratif dapat benar-benar terwujud. Kontribusi praktisnya adalah bahwa penguatan kelembagaan TPPS, reformulasi forum koordinasi, serta mekanisme akuntabilitas bersama sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan konvergensi kebijakan.

Penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan, yaitu belum maksimalnya pelacakan terhadap dinamika relasi informal yang juga memengaruhi praktik kebijakan di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali dimensi *multilevel governance*, dengan melihat bagaimana kebijakan pusat diterjemahkan di tingkat provinsi, kabupaten, dan nagari secara berlapis. Selain itu, perhatian terhadap dinamika kekuasaan antar aktor informal seperti tokoh adat, organisasi masyarakat, atau sektor swasta perlu diperdalam sebagai bagian dari konstruksi jaringan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2010). Integrative leadership and the creation and maintenance of cross-sector collaborations. *The Leadership Quarterly*, 21(2), 211–230.
- Hajer, M. A., & Wagenaar, H. (Eds.). (2003). *Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society*. Cambridge University Press.
- Head, B. W. (2008). Wicked problems in public policy. *Public Policy*, 3(2), 101–118.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Klijin, E. H. (1996). Analyzing and managing policy processes in complex networks. *Administration & Society*, 28(1), 90–119.
- Klijin, E. H., & Koppenjan, J. (2000). Public management and policy networks: Foundations of a network approach to governance. *Public Management*, 2(1), 135–158.

- Koppenjan, J. F. M., & Klijn, E. H. (2004). *Managing uncertainties in networks: A network approach to problem solving and decision making*. Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.). Sage Publications.
- Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan International Higher Education.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Schneider, M., Teske, P., & Mintrom, M. (1995). *Public entrepreneurs: Agents for change in American government*. Princeton University Press.
- Van Buuren, A., & Edelenbos, J. (2004). Why is joint knowledge production such a problem? *Science and Public Policy*, 31(4), 289–299.
- Van Waarden, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research*, 21(1–2), 29–52.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.